

# POLICY PAPER

## STRATEGI PENGUATAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN STUNTING DI DAERAH

**2024**

**Pusat Pelatihan dan  
Pengembangan dan Pemetaan  
Kompetensi Aparatur Sipil Negara  
Lembaga Administrasi Negara  
Tahun 2024**

## ***Policy Paper***

# **Strategi Penguatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting di Daerah**

### **Pengarah:**

Drs. Riyadi, M.Si.  
Dr. Joni Dawud, DEA.  
Iman Arisudana, S.Sos., MA.

### **Reviewer:**

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.  
Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A.  
Dr. Joni Dawud, DEA.

### **Tim Penulis:**

Candra Setya Nugroho, SH., MAP  
Dra. Marifa Ayu Kencana, MIS  
Sulistianingsih, S.Pd., M.E.  
Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd.  
Toni Syarif, S.Pd.  
Ferdie Febiansyah Djunaedi, SAP.



**Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan  
Kompetensi Aparatur Sipil Negara  
Lembaga Administrasi Negara  
Tahun 2024**

***Policy Paper***

**Strategi Penguatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan  
dalam Penanganan Stunting di Daerah**

Penulis : Candra Setya Nugroho, dkk.  
Editor : Drs.Riyadi,M.Si.  
Desain sampul : Ingrid Kusumaangraeni, S.Ds

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Cetakan 1, 2024

Hak Penerbitan pada:

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur  
Sipil Negara

Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Tel/Fax : (022) 7790048/ (022) 7790044 – 7790055

Email : [info@bandung.lan.go.id](mailto:info@bandung.lan.go.id)  
[puslatbangpkasn@gmail.com](mailto:puslatbangpkasn@gmail.com)

Web : [www.bandung.lan.go.id](http://www.bandung.lan.go.id)



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.....	v
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KAJIAN INOVASI MANAJEMEN ASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.....	vi
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.....	vii
ABSTRAK.....	ix
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KONSEP DAN KEBIJAKAN.....	7
C. KERANGKA PIKIR ANALISIS KEBIJAKAN.....	9
D. PERUMUSAN MASALAH.....	10
E. ALTERNATIF REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Evaluasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting “ 2023 Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.....	10
Tabel 2. Hasil Evaluasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting “ pada Aspek Rencana Aksi Tahun 2023 Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.....	12
Tabel 3. Daftar Kebijakan terkait Penurunan Stunting di Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.....	13
Tabel 4. Hasil Capaian Output dan Dampak pada Evaluasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting “ Tahun 2023 Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.....	22
Tabel 5. Kendala Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah.....	23
Tabel 6. Pohon Masalah Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah.....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Stunting Indonesia 2020-2024.....	2
Gambar 2. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi di Indonesia.....	2
Gambar 3. Faktor Kritis Permasalahan Stunting.....	3
Gambar 4. Berita Pemkab Garut menerima Penghargaan Digital Government Award.....	4
Gambar 5. Berita Pemkab Ciamis menerima Penghargaan Championship TP2DD.....	5
Gambar 6. Perbandingan Angka Stunting Kabupaten Garut dengan Rata-Rata Provinsi dan Nasional.....	6
Gambar 7. Angka Stunting Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2023.....	6
Gambar 8. Alur Pikir Analisis Kebijakan.....	10
Gambar 9. Dashboard Portal SIGA.....	15
Gambar 10. Dashboard Portal ELSIMIL.....	16
Gambar 11. Dashboard Portal VERVAL.....	16
Gambar 12. Dashboard portal Aksi Bangsa.....	17
Gambar 13. Dashboard Portal Stunting Ciamis.....	17
Gambar 14. Dashboard Portal Satu Data Garut.....	18
Gambar 15. Soislisasi Stunting di Kabupaten Ciamis dan Garut.....	21
Gambar 16. Kendala Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan di Daerah.....	23
Gambar 17. Tiga Masalah Utama dalam Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah.....	25
Gambar 18. Pohon Masalah Implementasi Digitalisasi Administrasi	

Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah...30

Gambar 19. Akar Masalah Pelaksanaan Digitalisasi Administrasi

Pemerintahan.....31

**SAMBUTAN**  
**PELAKSANA TUGAS KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia, salah satunya adalah stunting. Hal tersebut memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Berdasarkan data, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6% pada tahun 2022, jauh dari target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024. Kondisi ini menuntut inovasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Reformasi Birokrasi Tematik menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui digitalisasi administrasi pemerintahan, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi program penurunan stunting. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memanfaatkan sistem informasi yang telah tersedia dan mengintegrasikan data lintas sektor, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

*Policy paper* ini menawarkan analisis mendalam terhadap implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan di daerah, khususnya di Kabupaten Garut dan Cianjur. Berbagai tantangan, mulai dari perencanaan yang kurang spesifik hingga pemanfaatan data yang belum optimal, diidentifikasi secara komprehensif. Rekomendasi yang diusulkan mencakup langkah strategis untuk memperkuat proses bisnis, kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Kami berharap, *policy paper* ini dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendesain kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Digitalisasi bukan hanya alat, melainkan sebuah pendekatan untuk menghubungkan data, sumber daya, dan strategi dalam satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Dengan demikian, keberhasilan dalam penanganan stunting dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *policy paper* ini, termasuk tim penulis dan mitra-mitra terkait. Semoga dokumen ini dapat menjadi langkah awal bagi inovasi kebijakan dan reformasi birokrasi yang lebih baik di masa depan. Bersama-sama, mari kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat, maju, dan sejahtera.

Jakarta, November 2024



Muhammad Taufiq

**SAMBUTAN**  
**DEPUTI BIDANG KAJIAN DAN INOVASI MANAJEMEN ASN**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

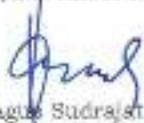
Demikian mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, pemerintah berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Hal itu juga sekaligus upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tahun 2024 adalah tahun keenam pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018 dan juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 juga mendorong akselerasi penanganan stunting melalui Reformasi Birokrasi Tematik.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pelatihan dan Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Tahun 2024 melaksanakan analisis kebijakan dengan judul Strategi Penguatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting di Daerah. Kegiatan analisis kebijakan ini difokuskan pada implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penurunan stunting di daerah. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan dan berperan strategis dalam melaksanakan penurunan angka stunting di Indonesia.

Luaran kajian (analisis kebijakan) Strategi Penguatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting di Daerah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan data digital stunting di daerah. Perbaikan pengelolaan data digital stunting diharapkan dapat menghasilkan data stunting yang akurat dan menjadi bahan penyusunan rekomendasi dan pengambilan kebijakan penurunan stunting di daerah.

Kesuksesan pengelolaan data stunting di daerah tidak lepas dari peran seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tingkat desa hingga tingkat daerah (kabupaten/kota/provinsi). Proses bisnis dan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam kesuksesan pengelolaan data digital stunting di daerah. Mari kita kawal dan dukung pelaksanaan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Jakarta, November 2024

  
Agus Sudrajat

**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN**  
**KOMPETENSI ASN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan hasil analisis kebijakan yang berjudul "Strategi Penguatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting di Daerah". Analisis kebijakan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagaimana strategi penguatan digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting di daerah. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan penguatan pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting di daerah. Lebih lanjut, apabila kebijakan penguatan pengelolaan data digital stunting tersebut sudah dirumuskan dan diimplementasikan, diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka stunting di daerah.

Banyak pihak yang berperan dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan ini. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Taufiq, DEA sebagai Plt. Kepala LAN; Sekretaris Utama LAN; Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara; Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara; narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi; narasumber dari Pemerintah Daerah yang menjadi lokus; serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah bersedia meluangkan waktu serta menyampaikan informasi, pengetahuan maupun pengalamannya untuk memperkaya hasil analisis kebijakan. Selain itu, kami sampaikan penghargaan kepada Tim Analisis Kebijakan Puslatbang PKASN yang telah berupaya keras melaksanakan analisis kebijakan ini sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa hasil rekomendasi kebijakan ini masih jauh dari kata sempurna. Tentunya, kami mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan rekomendasi kebijakan ini. Selain itu, kami juga berharap hasil rekomendasi kebijakan ini dapat diadopsi menjadi kebijakan publik, sehingga dapat berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di daerah. Akhirnya, semoga rekomendasi kebijakan

dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan di daerah, serta memberikan wawasan  
keilmuan bagi siapa saja yang membacanya. Terima kasih.

Sumedang, November 2024



Rivadi

## ABSTRAK

Saat ini kondisi stunting di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hal itu maka salah satu fokus RB Tematik adalah “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dengan Fokus Penanganan Stunting”. Program RB Tematik ini berperan dalam mewujudkan optimalisasi penanganan stunting dengan pemanfaatan teknologi digital. Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi bahan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi stakeholder.

Permasalahannya adalah digitalisasi pemerintah (melalui pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sudah berjalan baik tetapi belum memberikan dampak dalam penurunan angka stunting. Hal itu juga terjadi pada lokus analisis yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui masalah yang menyebabkan belum optimalnya dampak digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penurunan angka stunting di daerah. Perumusan strategi yang tepat diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga pelaksanaan RB Tematik benar-benar dapat memberikan dampak, khususnya dalam penurunan angka stunting di daerah.

Kerangka analisis kebijakan ini didasarkan atas pendekatan *evidence based policy* (kebijakan berbasis bukti) dan didukung konsep *knowledge management* (manajemen pengetahuan). Pemanfaatan sistem informasi diharapkan menghasilkan/ memproduksi data digital stunting yang akurat. Data digital stunting yang tersedia selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam penyusunan analisis kebijakan untuk penetapan kebijakan yang tepat dan terukur dalam percepatan penurunan stunting di daerah. Tahapan analisis kebijakan diawali dengan melakukan perumusan masalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada proses manajemen pengetahuan digitalisasi stunting. Masalah-masalah yang sudah diidentifikasi selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis lebih lanjut untuk menemukan penyebab dan akar masalahnya. Berdasarkan hasil analisis masalah tersebut selanjutnya dikembangkan alternatif dan rekomendasi kebijakan untuk penyelesaiannya.

Proses pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintahan, berdasarkan penggalan data lapangan yang dilakukan pada Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut, ditemukan tiga masalah utama yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut antara lain: Perencanaan (Rencana Aksi) Kurang Spesifik dan Implementatif; Digitalisasi Stunting belum Didukung dengan Proses Bisnis yang Baik; dan Pemanfaatan Data Digital untuk Pengambilan Kebijakan Penurunan Stunting Masih Lemah. Berdasarkan analisis pohon masalah maka dapat ditemukan akar masalah pada masalah utama tersebut yaitu: Lemahnya pemahaman TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting) di daerah dalam pengelolaan data stunting; Tidak tersedianya proses bisnis pengelolaan data stunting yang memadai; dan tidak jelasnya peran setiap pihak (aktor) dalam pengelolaan data stunting.

Berdasarkan permasalahan pada pelaksanaan RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting di daerah terdapat beberapa alternatif solusi untuk penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut: Penguatan Penguasaan Literasi Digital untuk Pengelolaan Data Digital Stunting; Penyusunan Proses Bisnis Pengelolaan Data Digital Stunting yang Komprehensif; dan Peningkatan Peran Semua Pihak (aktor) dalam Pengelolaan Data Digital Stunting Secara Komprehensif dan Kolaboratif.

Untuk melaksanakan alternatif kebijakan tersebut maka strategi implementasi yang perlu dilakukan antara lain: TPPS daerah melakukan identifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data stunting, mulai dari proses pengumpulan data hingga pemanfaatan data digital stunting; TPPS mengundang, meminta dukungan dan memberikan pembekalan kepada semua pihak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan data digital stunting dengan mengundang pihak akademisi, profesional, dan lainnya; TPPS bersama seluruh pihak menyusun perencanaan pengelolaan data digital stunting termasuk proses bisnis dan pembagian peran serta target masing-masing pihak (aktor); TPPS melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan data digital stunting serta melaporkan kepada pimpinan; dan Pimpinan di daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan data digital stunting dan memanfaatkan data tersebut untuk mengambil kebijakan yang tepat.

## **A. PENDAHULUAN**

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. Selain tetap melaksanakan reformasi birokrasi general pada delapan (8) aspek yang sudah dilakukan sebelumnya, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada penyelesaian masalah prioritas nasional.

Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas nasional untuk segera diatasi pemerintah adalah masalah stunting. Berdasarkan hasil riset *Center for Indonesian Studies* (CIPS) Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 21 juta masyarakat atau setara 7 persen dari total populasi penduduk Indonesia, kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kementerian Kesehatan sebesar 2.100 kkal. Pada tahun 2022, sekitar 21,6 persen anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting (rasio tinggi berbanding usia rendah), dan 7,7 persen menderita wasting (rasio berat badan berbanding tinggi badan rendah) (Kumparan Bisnis, 2023).

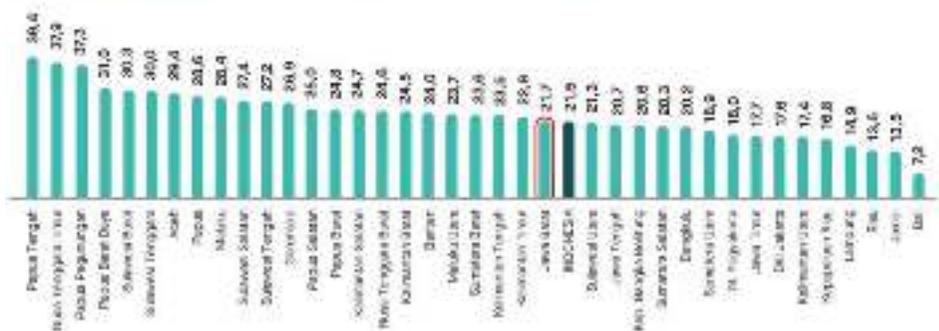
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting Indonesia tahun 2022 adalah 21,6 persen, kondisi ini masih jauh dari target pemerintah tahun 2022 yaitu 18,4 persen. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan angka stunting di tahun 2022 sebesar 21,6 persen maka untuk mencapai target akhir RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) diperlukan penurunan sebesar rata-rata 3,8 persen di setiap tahunnya.



Gambar 1. Data Stunting Indonesia 2020-2024  
Sumber data: SSGI Kementerian Kesehatan

Kondisi stunting nasional dipengaruhi oleh kondisi stunting di daerah. Kondisi stunting di setiap daerah bervariasi, terdapat daerah yang angka stuntingnya di bawah rata-rata nasional dan banyak yang di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan provinsi yang memiliki angka stunting paling rendah adalah Provinsi Bali dengan nilai 7,2. Provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi adalah Provinsi Papua Tengah dengan nilai 39,4. Untuk angka stunting rata-rata nasional sebesar 21 persen.

### PREVALENSI BALITA STUNTING MENURUT PROVINSI DI INDONESIA, SKI 2023



Gambar 2. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi di Indonesia  
Sumber: Kemenkes RI, 2023

Ada banyak faktor yang mempengaruhi stunting, baik faktor medis maupun nonmedis. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting di Indonesia yaitu: buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan stunting.



Gambar 3. Faktor Kritis Permasalahan Stunting  
Sumber: Kemenpan RB, 2023

Berdasarkan hal itu maka untuk menyelesaikan masalah stunting ditetapkan salah satu fokus RB Tematik adalah digitalisasi administrasi pemerintahan dengan fokus penanganan stunting. Program RB Tematik ini berperan dalam mewujudkan optimalisasi penanganan stunting dengan pemanfaatan teknologi digital. Sebagai salah satu faktor strategis, pengintegrasian sistem informasi penanganan stunting dipandang perlu untuk segera diwujudkan. Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh *stakeholder*.

Pemanfaatan digitalisasi Indonesia saat ini sudah cukup baik, tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai dampaknya. Untuk mendorong pemanfaatan digitalisasi, pemerintah melakukan upaya dalam mengembangkan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Capaian digitalisasi Indonesia mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam *UN E-Government Survey* Tahun 2024, dengan meraih peringkat 64 di antara 193

negara anggota PBB. Peringkat Indonesia tersebut melompat 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022.

Pada akhirnya optimalisasi digitalisasi administrasi pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak, salah satunya dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Dalam rangka menyukseskan program RB Tematik tersebut maka seluruh instansi pemerintah didorong untuk memperkuat pemanfaatan digitalisasi, khususnya pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Pemerintah daerah dapat melaksanakan RB Tematik diharapkan mengoptimalkan sistem informasi yang sudah tersedia, tanpa harus membangun sebuah aplikasi tersendiri.

Untuk melakukan analisis pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintah yang berfokus dalam penurunan stunting maka dipilih lokus analisis yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Komitmen pelaksanaan digitalisasi di Kabupaten Garut saat ini sangat kuat dengan ditetapkannya kebijakan SPBE di lingkungan Kabupaten Garut melalui Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga menetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Garut Satu Data. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Garut dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Garut. Hal itupun mengantarkan Pemerintah Kabupaten Garut menerima Anugerah Pemerintahan Digital atau *Digital Government Award* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2023 pada kategori kebijakan bersama Kabupaten Magelang dan 4 kota, yaitu Kota Denpasar, Semarang, Banda Aceh, dan Kota Depok.



Gambar 4. Berita Pemkab Garut menerima Penghargaan *Digital Government Award*

Sumber: [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id), 2023

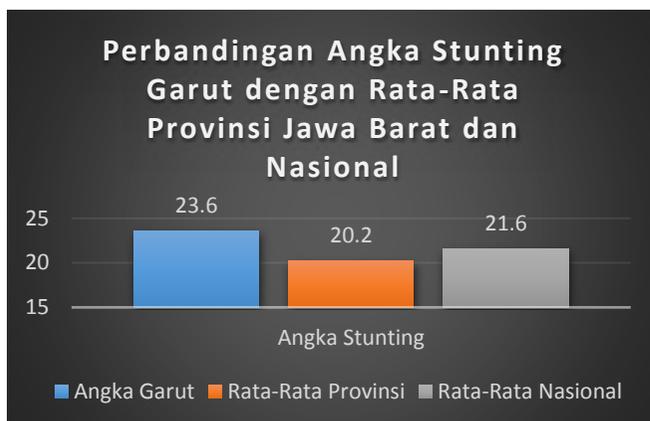
Kabupaten Ciamis juga sudah menjalankan digitalisasi dengan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Ciamis menerbitkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pemerintah Kabupaten Ciamis juga mendorong penggunaan digitalisasi samapai ke Desa dengan telah dibangun Sistem Informasi Desa (SID) di 61 (enam puluh satu) Desa. Atas upayanya tersebut, dalam Rakornas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023, dianugerahi sebagai Kabupaten terbaik dalam evaluasi kinerja TP2DD tahun 2022 (*Award 2023*) dari Kemenko Perekonomian.



Gambar 5. Berita Pemkab Ciamis menerima Penghargaan *Championship TP2DD*

Sumber: [peloporwiratama.co.id](http://peloporwiratama.co.id), 2023

Permasalahannya adalah meskipun digitalisasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis sudah berjalan baik tetapi belum memberikan dampak karena angka stunting di kedua daerah tersebut relatif tinggi (di atas rata-rata nasional). Hal itu menunjukkan bahwa kondisi digitalisasi yang baik tidak dapat memberikan jaminan penurunan angka stunting di daerah tersebut. Kondisi stunting di kabupaten Garut saat ini masih cukup tinggi. Angka stunting di Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah 23,6 persen. Hasil pengukuran tersebut didapat atas pengukuran terhadap jumlah sasaran balita sebanyak 216.172 balita di Kabupaten Garut, yang memperoleh hasil sebanyak 25.531 balita diidentifikasi stunting. Angka stunting Kabupaten Garut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi 20,2 persen dan rata-rata nasional sebesar 21 persen.



Gambar 6. Perbandingan Angka Stunting Kabupaten Garut dengan Rata-Rata Provinsi dan Nasional  
Sumber: Diolah, 2024

Kondisi stunting Kabupaten Ciamis saat ini juga masih perlu mendapatkan perhatian karena cukup tinggi, bahkan mengalami kenaikan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), angka atau prevalensi stunting di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 naik menjadi 25,4 persen di mana pada Tahun 2022 sebesar 18,6 persen, padahal angka stunting di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2021 hanya sebesar 16 persen.



Gambar 7. Angka Stunting Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2023  
Sumber: Diolah, 2024

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui masalah yang menyebabkan belum optimalnya dampak digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penurunan angka stunting di daerah. Perumusan strategi yang tepat diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga pelaksanaan RB Tematik benar-benar dapat memberikan dampak, khususnya dalam penurunan angka stunting di daerah.

## **B. KONSEP DAN KEBIJAKAN**

### **1. Konsep Digitalisasi Pemerintahan**

#### **a. *Digital Transformation Government (DGT)***

Perubahan pelayanan pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai transformasi digital pelayanan publik. Contoh transformasi ini adalah penggunaan portal, website, layanan WhatsApp, layanan virtual, integrasi sistem, dll yang memberikan pelayanan terpadu sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, terjangkau, dan akuntabel untuk saat ini (Boban & Klaric, 2021) dalam Sisilianingsih, S, *et al.* (2023). Model ini mengacu pada penelitian Tangi *et al.* (2021) yang menggunakan teori Digital Government Transformation (DGT) dengan faktor kegiatan manajerial, hambatan budaya, hambatan organisasi, dan transformasi.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses transformasi e-government secara umum dikaji dalam kerangka DGT, yaitu dalam aspek pelayanan, dilakukan modifikasi dengan menambahkan variabel yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu variabel peningkatan pelayanan publik yang juga telah dikaji sebelumnya oleh S. C. Shin *et al.* (2020) dan Bousdekis & Kardaras (2020a) dalam Sisilianingsih, S, *et al.* (2023) bahwa penyampaian layanan digital merupakan cara baru untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Komponen pelayanan publik dipertimbangkan ke dalam format elektronik pelayanan dan waktu pelayanan (S. C. Shin & Rakhmatullayev, 2019). Permasalahan yang dihadapi dalam proses transformasi digital di pemerintahan adalah lambatnya kemajuan transformasi itu sendiri karena keterbatasan infrastruktur (S. C. Shin & Rakhmatullayev, 2019) (S. C. Shin *et al.*, 2020), masalah kepemimpinan (S. C. Shin & Rakhmatullayev, 2019),

terbatasnya pengetahuan sumber daya manusia literasi IT (S. C. Shin et al., 2020) dan regulasi yang tidak mendukung proses transformasi (Boban & Klaric, 2021).

b. *Good Governance*

*Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan unggul sehingga melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dianggap sehat secara teknis, profesional, organisasi, manajerial, politik, demokratis, dan ekonomi. Sesuai dengan arahan presiden dan *roadmap* percepatan transformasi pelayanan publik (KemenpanRB, 2021), konsep transformasi digital pelayanan publik merupakan perwujudan perubahan kualitas pemerintahan yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan pada Forum Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB), 24 Maret 2022 bahwa pemerintah perlu mengubah proses bisnis dari cara lama menuju transformasi digital yang memudahkan birokrasi. Proses tersebut dapat mengakomodir arah kebijakan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024.

2. Kebijakan Digitalisasi Pemerintahan

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

UU KIP menjamin hak masyarakat (*stakeholder*) untuk memperoleh informasi publik dari badan publik (instansi pemerintah) secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Undang-Undang ini juga menyatakan "badan publik wajib untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara berkala, serta menyediakan informasi publik setiap saat". Digitalisasi layanan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien.

b. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*

Inpres ini menjadi landasan awal dalam pengembangan *e-government* di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah "untuk menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan

dengan memanfaatkan teknologi informasi". Namun, belum adanya tindak lanjut yang konkret dan terkoordinasi menyebabkan perkembangan *e-government* masih belum optimal.

c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres SPBE menjadi landasan utama dalam transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Peraturan ini mengamanatkan integrasi sistem elektronik dan data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa "integrasi SPBE meliputi integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan". Instansi pemerintah diharapkan menyusun peta jalan dan arsitektur SPBE yang jelas agar implementasi integrasi SPBE berjalan optimal.

d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Permenpan ini mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah integrasi sistem elektronik dan data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Standar dan indikator perlu disusun dengan jelas dalam mengukur tingkat integrasi SPBE agar hasil evaluasinya dapat lebih optimal.

Berdasarkan analisis peraturan perundangan dan kebijakan terkait, diharapkan digitalisasi perlu dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan yang jelas (arsitektur SPBE), implementasi yang rapi dan teratur (proses bisnis), dan tujuan yang jelas/ berdampak (pemanfaatan data dan informasi).

### **3. KERANGKA PIKIR ANALISIS KEBIJAKAN**

Kerangka analisis kebijakan didasarkan dengan pendekatan *evidence based policy* (kebijakan berbasis bukti) dan didukung konsep *knowledge management* (manajemen pengetahuan). Pemanfaatan sistem informasi diharapkan menghasilkan/memproduksi data digital stunting yang akurat. Data digital stunting yang tersedia selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber

pengetahuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan terukur dalam percepatan penurunan stunting di daerah.



Gambar 8. Alur Pikir Analisis Kebijakan

Sumber: Olan, 2024

Tahapan analisis kebijakan diawali dengan melakukan perumusan masalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada proses manajemen pengetahuan digitalisasi stunting. Masalah-masalah yang sudah diidentifikasi selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis lebih lanjut untuk menemukan penyebab dan akar masalahnya. Berdasarkan hasil analisis masalah tersebut selanjutnya dikembangkan alternatif dan rekomendasi kebijakan untuk penyelesaiannya.

#### 4. PERUMUSAN MASALAH

Implementasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting” secara umum belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal itu juga terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis, dimana hasil data menunjukkan baik dalam aspek rencana aksi, pencapaian *output* dan pencapaian dampak masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal itu sesuai dengan hasil evaluasi RB yang dilakukan oleh Kemenpan RB Tahun 2023.

Tabel 1. Hasil Evaluasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting” 2023 Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis

Aspek Penilaian	Kabupaten Garut	Kabupaten Ciamis
Rencana Aksi	Bobot: 0.4 Skor: 0.17 Skor Index: 0.17	Bobot: 0.4 Skor: 0.23 Skor Index: 0.23
Capaian <i>Output</i>	Bobot: 0.6 Skor: 80.7 Skor Index: 0.21	Bobot: 0.6 Skor: 97.65 Skor Index: 0.34
Capaian Dampak	Bobot: 3 Skor: 2.25 Skor Index: 2.25	Bobot: 3 Skor: 0.75 Skor Index: 0.75

Sumber: LHE RB Kemenpan RB, 2023

Dalam proses pelaksanaan digitalisasi administrasi pemerintahan, berdasarkan penggalan data lapangan yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Garut, ditemukan 9 (sembilan) hal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Diantara isu tersebut adalah:

1. Perencanaan (Rencana Aksi) Kurang Spesifik dan Implementatif

Secara umum perencanaan pelaksanaan RB Tematik “digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting” dituangkan pada *road map* reformasi birokrasi masing-masing daerah. *Road map* RB Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024. *Road map* RB Kabupaten Garut diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pada *road map* RB tersebut sudah ditetapkan target (sesuai indikator sasaran). Untuk di Kabupaten Garut, RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting ditetapkan sasaran “meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting” dan indikator “prevalensi stunting” dengan target Tahun 2023 sebesar 16 persen dan Tahun 2024 sebesar 14 persen dengan *leading sector* Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting).

Hasil penilaian RB Tahun 2023 baik di Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Garut mendapatkan nilai yang belum optimal. Hasil tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Evaluasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting” pada Aspek Rencana Aksi Tahun 2023 Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis

Aspek Penilaian	Kabupaten Garut	Kabupaten Ciamis
Rencana Aksi	Bobot: 0.4 Skor: 0.17 Skor Index: 0.17	Bobot: 0.4 Skor: 0.23 Skor Index: 0.23

Sumber: LHE RB Kemenpan RB, 2023

Dari hasil LHE RB tersebut ada catatan yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait rencana aksi yaitu rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.

Hal itu juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang menyatakan bahwa target yang ditetapkan pada *roadmap* RB belum maksimal karena tidak sampai pada target untuk masing-masing Perangkat Daerah. Belum ada target Perangkat daerah mulai target input, proses sampai *outputnya*. Hal itu juga diakui oleh Tim RB bahwa Tahun 2023 merupakan Tahun awal RB Tematik sehingga pemerintah daerah masih mencari bentuk.

## 2. Penyusunan Perencanaan belum Melibatkan Seluruh *Stakeholder*

Penyusunan perencanaan (rencana aksi) RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penurunan Stunting masih disusun oleh unsur pemerintah, belum melibatkan *stakeholder*. Pemerintah seharusnya menyusun perencanaan (rencana aksi) dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, sehingga hasilnya dapat lebih akurat.

Hal itu sesuai dengan catatan Kemenpan RB pada LHE RB Tahun 2023 baik di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut yang menyatakan bahwa “rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya

kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau *stakeholder* eksternal di luar pemerintahan”. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh TPPS bahwa Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penurunan Stunting sehingga Pemerintah Daerah melakukan penyusunan perencanaan (rencana aksi) hanya dilakukan oleh unsur pemerintah saja yaitu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Ahli yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### 3. Kebijakan Teknis/ Operasional belum Seluruhnya Disusun

Sudah ada beberapa kebijakan ditetapkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penurunan Stunting baik oleh Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Garut. Beberapa kebijakan yang sudah disusun oleh kedua pemerintah daerah tersebut seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. Daftar Kebijakan terkait Penurunan Stunting di Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis

Kabupaten Garut	Kabupaten Ciamis
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Bupati Garut Nomor: 440/KEP.189-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten</li> <li>Keputusan Bupati Garut Nomor: 440/KEP.335-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024</li> <li>Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 045.4/Kpts.168-Huk/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ciamis</li> <li>Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020</li> </ul>

Kabupaten Garut	Kabupaten Ciamis
<p>DINKES/2022 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Bupati Garut Nomor: 500.1.4.1/494/DKP tentang Himbauan untuk Mengonsumsi Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</li> <li>• Surat Edaran Bupati Garut Nomor: 400.2.5/623/DINKES tentang Gerakan Bersama Percepatan Penurunan Stunting Menuju Zero New Stunting di Kabupaten Garut</li> <li>• Surat Edaran Nomor: 400.7.15/778/DINKES tentang Pelaksanaan Posyandu Paripurna sebagai Upaya Peningkatan Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Pencegahan Balita Stunting di Kabupaten Garut</li> <li>• Surat Edaran Bupati Garut Nomor: 400.2.5/1312/KESRA TENTANG Dukungan Konsumsi Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri (TTD Rematri) dan Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah/ Madrasah (termasuk Skrining Anemia) dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Garut</li> <li>• Surat Edaran Bupati Garut Nomor: 555/3903/Bappeda</li> </ul>	<p>tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ciamis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ciamis</li> </ul>

Kabupaten Garut	Kabupaten Ciamis
tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Mencegah Stunting	

Sumber: Diolah, 2024

Kebijakan yang disusun oleh Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis sudah cukup banyak, tetapi masih ada kebijakan teknis yang perlu untuk disusun agar pelaksanaan kegiatan penurunan stunting berjalan baik. Kebijakan yang belum ada salah satunya terkait proses bisnis secara makro (lintas sektor) dan mikro (internal perangkat daerah) dalam pelaksanaan kegiatan penurunan stunting. Selain itu belum ada pengaturan terkait mekanisme kerja TPPS dalam berbagai kegiatan penurunan stunting. Selain itu pengaturan terkait manajemen risiko juga belum disusun. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang dilakukan TPPS maupun terkait dengan *stakeholder* kurang berjalan sesuai dengan harapan.

#### 4. Digitalisasi belum Didukung dengan Proses Bisnis yang Baik

Saat ini aplikasi untuk pengelolaan data digital terkait stunting sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Ciamis. Untuk aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diantaranya:

##### a) Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGA)

Aplikasi ini dikoordinasikan oleh BKKBN berisi informasi terkait keluarga



Gambar 9. Dashboard Portal SIGA

Sumber: BKKBN, 2024

- b) Elektronik siap nikah dan hamil (ELSIMIL)  
Aplikasi ini dikoordinasikan oleh BKKBN yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita yang datanya didapat dari tim pendamping keluarga tiap desa.



Gambar 10. Dashboard Portal ELSIMIL  
Sumber: BKKBN, 2024

- c) Aplikasi verifikasi data keluarga berisiko stunting (Verval)  
Aplikasi ini dikoordinasikan oleh BKKBN yang diisi 1 tahun sekali dengan tujuan menyediakan data keluarga berisiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan maupun intervensi program dalam rangka percepatan penurunan stunting



Gambar 11. Dashboard Portal Verval  
Sumber: BKKBN, 2024

Selain itu ada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yang disebut Aksi Bangsa. Aplikasi ini bertujuan untuk memantau manajemen penurunan stunting di daerah melalui substansi 8 aksi konvergensi stunting: aksi 1 analisa situasi stunting, aksi 2 rencana kegiatan, aksi 3 rembug stunting, aksi 4 regulasi tentang stunting, aksi 5 pembinaan unsur pelaku, aksi 6 sistem manajemen data, aksi 7 data cakupan sasaran dan publikasi data, aksi 8 review kerja.



Gambar 12. Dashboard portal Aksi Bangsa  
Sumber: Kemendagri, 2024

Selain melalui aplikasi dari Pusat, pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut juga mengembangkan aplikasi untuk melakukan pengelolaan data stunting. Kabupaten Ciamis ada aplikasi yang berupa dashboard data stunting Kabupaten Ciamis ([stunting.ciamiskab.go.id](http://stunting.ciamiskab.go.id)) dengan pengelolanya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.



Gambar 13. Dashboard Portal Stunting Ciamis  
Sumber: Diskominfo Ciamis, 2024

Kabupaten Garut menyediakan aplikasi berupa dashboard data stunting pada aplikasi satu data Garut yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.



Gambar 14. Dashboard Portal Satu Data Garut  
Sumber: Diskominfo Garut, 2024

Meskipun ada banyak aplikasi dalam pengelolaan data stunting ternyata ada kendala, salah satunya adalah terkait pengelolaan data stunting di aplikasi internal daerah. Seharusnya setiap pembaruan data stunting yang dilakukan oleh TPPS melalui aplikasi Pusat juga disampaikan kepada Diskominfo untuk dilakukan pembaharuan di aplikasi internal (daerah) tetapi saat ini masih ada kendala dalam proses tersebut. Belum ada proses bisnis pengelolaan data digital, khususnya untuk yang lintas sektor (antar perangkat daerah) sehingga pembaruan data aplikasi terhambat (tidak konsisten). Hal itu mengakibatkan perangkat daerah yang mengelola urusan sektoral, tidak secara otomatis melakukan dan melaporkan pembaruan data kepada Diskominfo untuk dilakukan pembaruan informasi di aplikasi.

#### 5. Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Data Digital Belum Optimal

Saat ini jangkauan internet di Kabupaten Ciamis sudah 100 persen. Kabupaten Ciamis sudah mendorong dan memfasilitasi penggunaan digitalisasi sampai ke Desa dengan telah dibangun Sistem Informasi Desa (SID) di 61 (enam puluh satu) Desa. Untuk Kabupaten Garut mayoritas wilayahnya juga sudah terjangkau internet. Baik di Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis ada anggaran bagi tim pendamping keluarga untuk biaya internet perbulan sebanyak Rp 100.000,-/ orang, yang sumber anggarannya dari pemerintah pusat.

Saat ini masih ada beberapa wilayah sebanyak 5 desa di Kabupaten Garut masuk wilayah *blankspot*, ini menjadi hambatan bagi kader dalam melakukan input dan *update* data

stunting. Selain masalah jangkauan internet, ada permasalahan juga terkait perangkat IT yang dimiliki tim pendamping keluarga di Desa belum mendukung penginputan data digital stunting.

#### 6. SDM Pengelola Data Digital Belum Optimal

Dalam melaksanakan RB Tematik “digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting” di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Untuk TPPS di Kabupaten Ciamis ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 045.4/Kpts.168-Huk/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ciamis. Untuk TPPS di Kabupaten Garut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Garut Nomor: 440/KEP.189-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten. Selain TPPS, pelaksanaan penurunan stunting praktiknya juga didukung oleh beberapa aktor, salah satunya adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK berada di setiap desa dan bertugas untuk melakukan input data stunting di sistem. Tim Pendamping Keluarga terdiri dari 3 orang yang berisi komposisi 1 orang bidan, 1 orang penggerak PKK, dan 1 orang pos KB Desa. Di Kabupaten Garut ada sebanyak 1991 Tim dan di Kabupaten Ciamis sebanyak 947 Tim. Selain di tingkat desa juga dibentuk admin di tingkat kecamatan dan kabupaten. Banyak SDM yang terlibat dalam upaya penanganan stunting, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Beberapa masalah terkait SDM tersebut antara lain kurangnya jumlah dan kompetensi SDM.

Terkait jumlah SDM, salah satunya di Dinas Keluarga Berencana di Garut pengelola data stunting hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yang berstatus TKK (Non ASN). Jumlah SDM masih kurang untuk melakukan pengelolaan data stunting pada beberapa aplikasi yang ada. Selain itu, jumlah SDM di Diskominfo Kabupaten Garut juga masih kurang dimana berdasarkan hasil Anjab dan ABK kebutuhan statistisi (pengolah data) berjumlah 6 orang tetapi kondisi saat ini 0 orang (tidak ada). Di Kabupaten Ciamis juga masih kekurangan SDM pengelola data kesehatan di Puskesmas. Dengan banyaknya aplikasi dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lainnya hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu

nutrisisionis. Pegawai tersebut selain melakukan pengelolaan data kesehatan harian juga harus melakukan pelayanan kesehatan setiap harinya.

Selain masalah jumlah, ada juga masalah terkait kompetensi SDM. Meskipun saat ini sudah ada upaya untuk pengembangan kompetensi bagi TPK, melalui sosialisasi, tetapi upaya tersebut masih belum optimal dalam peningkatan kompetensi TPK. Kelemahan kompetensi SDM tersebut menyebabkan cakupan pengisian aplikasi stunting belum optimal.

#### 7. Koordinasi antar Perangkat Daerah Belum Optimal

Pelaksanaan upaya penurunan stunting melibatkan berbagai aktor, terutama dari unsur pemerintah (perangkat daerah terkait). Meskipun sudah dibentuk TPPS, tetapi keterlibatan dan peran perangkat daerah sangat penting dalam pelaksanaan menentukan kesuksesan pelaksanaan RB Tematik “digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting”. Pengelolaan data digital stunting juga perlu dukungan dari perangkat daerah terkait karena sumber data juga berasal dari perangkat daerah tersebut. Khususnya untuk TPPS dilakukan koordinasi melalui rapat rutin setiap bulan. Selain rapat bulanan juga ada rapat khusus yang dilakukan apabila ada hal-hal mendesak yang perlu diselesaikan. Selain itu juga ada monitoring yang dilakukan setiap 3 bulan (triwulan). Koordinasi dan komitmen perangkat daerah terkait pengelolaan data digital stunting masih belum optimal, karena masih terjadi keterlambatan penginputan data di sistem aplikasi stunting. Beberapa perangkat daerah tidak dapat menyerahkan data dengan tepat waktu kepada TPPS untuk diinput di aplikasi pemerintah pusat. Hal itu juga dialami oleh Diskominfo Kabupaten Garut sebagai pengelola aplikasi stunting internal yang menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk meminta data-data sektoral dari masing-masing perangkat daerah, termasuk data stunting.

#### 8. Kesadaran Masyarakat terkait Penanganan Stunting Masih Kurang

Saat ini sudah dilakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan masalah stunting di masyarakat. Sosialisasi sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Ciamis

melakukan sosialisasi melalui website dan media komunikasi online lain melalui Diskominfo. Selain itu, TPPS juga melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan pemerintah desa dan unsur lainnya.



Gambar 15. Soislisi Stunting di Kabupaten Ciamis dan Garut  
Sumber: sakata.id dan jabar.times.co.id

Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan masalah stunting di masyarakat, tetapi kenyataannya masih ada masyarakat yang rendah kesadaran terkait stunting. Ada masyarakat yang tidak membawa anaknya ke posyandu, sehingga tidak dapat dipantu status kesehatannya (termasuk gizinya). Khususnya di Kabupaten Garut hasil pendataan kesehatan masih sebesar 85%.

Selain itu, di masyarakat terkait isu stunting ini harus hati-hati karena tidak ada orang tua yang dibilang anaknya stunting. Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut juga pernah disomasi karena kepala desa tidak terima dengan data masyarakatnya yang mengalami stunting.

#### 9. Pemanfaatan Data Digital Untuk Pengambilan Kebijakan Penurunan Stunting Masih Lemah

Pemanfaatan data stunting untuk pengambilan kebijakan saat ini sudah dilakukan tetapi masih bersifat parsial. TPPS memanfaatkan data tersebut untuk menentukan lokus percepatan penanganan stunting di wilayah yang angka stuntingnya masih tinggi.

Selain itu pemanfaatan data digital stunting diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah terkait. Salah satu contoh adalah terkait data lokus dengan angka stunting tinggi akan dijadikan dasar bagi perangkat daerah melaksanakan

kegiatannya di daerah tersebut. Data gizi buruk digunakan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk memfokuskan pemberian hasil peternakan dan perikanan pada wilayah yang memiliki kondisi gizi buruk masih tinggi. Dinas PUPR melakukan intervensi melalui rutilahu pada daerah yang belum mempunyai jamban. Dinas Kesehatan melakukan tindakan kepada daerah yang kasus gizi buruknya tinggi. Dinas KB melakukan intervensi kepada daerah yang berisiko stuntingnya tinggi.

Pemanfaatan data digital stunting masih belum optimal karena tidak ada proses bisnis yang dibuat dalam rangka pemanfaatan data digital stunting agar lebih memberikan dampak. Belum ada upaya yang lebih terstruktur dalam pemanfaatan data stunting. Hal itu diutarakan oleh TPPS yang menyatakan bahwa pengelolaan data digital stunting sudah sudah cukup baik, tetapi untuk eksekusi intervensi di lapangan masih belum optimal.

Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB Tahun 2023 menunjukkan nilai capaian output dan capaian dampak pada RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting masih kurang. Nilai capaian output dan capaian dampak pada RB Tematik tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Capaian Output dan Dampak pada Evaluasi RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting “ Tahun 2023 Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis

<b>Aspek Penilaian</b>	<b>Kabupaten Garut</b>	<b>Kabupaten Ciamis</b>
Capaian Output	Bobot: 0.6 Skor: 80.7 Skor Index: 0.21	Bobot: 0.6 Skor: 97.65 Skor Index: 0.34

Aspek Penilaian	Kabupaten Garut	Kabupaten Ciamis
Capaian Dampak	Bobot: 3 Skor: 2.25 Skor Index: 2.25	Bobot: 3 Skor: 0.75 Skor Index: 0.75

Sumber: LHE RB Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis (Kemenpan RB, 2023)



Gambar 16. Kendala Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan di Daerah

Sumber: Olahan Tim Analisis, 2024

Berdasarkan identifikasi kendala implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penurunan stunting di daerah maka akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan masalah utama (masalah kunci). Untuk menentukan masalah kunci tersebut, maka akan dilakukan penilaian dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu strategis, urgen, dan fisibel. Adapun gambaran penentuan masalah utama adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kendala Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah

Kendala Dan Hambatan	Strategis (40%)	Urgen (35%)	Visibel (25%)	Total
1) Perencanaan (Rencana Aksi) Kurang Spesifik dan Implementatif	2.8	2.8	2	7.6
2) Penyusunan Perencanaan belum Melibatkan Seluruh Stakeholder	3.6	2.45	1.5	7.55
3) Kebijakan Teknis/ Operasional belum Seluruhnya Disusun	3.2	2.45	1.75	7.4
4) Digitalisasi belum Didukung dengan Proses Bisnis yang Baik	2.8	2.8	2	7.6
5) Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Data Digital Belum Optimal	2.4	2.1	1.75	6.25
6) SDM Pengelola Data Digital Belum Optimal	2.8	2.45	2	7.25
7) Koordinasi antar Perangkat Daerah Belum Optimal	2.8	2.8	1.75	7.35
8) Kesadaran Masyarakat terkait Penanganan Stunting Masih Kurang	2	2.1	1.75	5.85
9) Pemanfaatan Data Digital Untuk Pengambilan Kebijakan Penurunan Stunting Masih Lemah	3.6	3.15	1.75	8.5

Sumber: Olahan Tim Analis, 2024

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa tiga masalah utama dalam implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penurunan stunting di daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 17. Tiga Masalah Utama dalam Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah

Sumber: Olahan Tim Analisis, 2024

Tiga masalah utama dalam implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penurunan stunting di daerah tersebut akan dianalisis lebih lanjut akar masalahnya. Analisis ini menggunakan tools pohon masalah. Analisis masalah ini untuk menentukan akar masalahnya agar dapat dirumuskan secara tepat solusinya. Analisis akar masalah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan (Rencana Aksi) Kurang Spesifik dan Implementatif

Perencanaan pelaksanaan RB Tematik “digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting” di daerah dituangkan pada road map reformasi birokrasi masing-masing daerah. Road map RB Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024. Road map RB Kabupaten Garut diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pada road map RB tersebut sudah ditetapkan target (sesuai indikator sasaran). Untuk di Kabupaten Garut untuk RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting ditetapkan sasaran “meningkatnya implementasi transformasi digital

dalam penanganan stunting” dan indikator “prevalensi stunting” dengan target Tahun 2023 sebesar 16% dan Tahun 2024 sebesar 14% dengan leading sector Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting). Untuk di Kabupaten Garut untuk RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting ditetapkan sasaran “meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting” dan indikator “prevalensi stunting” dengan target Tahun 2023 sebesar 16% dan Tahun 2024 sebesar 14% dengan leading sector Tim Penanganan Stunting.

Hasil penilaian RB Tahun 2023 baik di Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Garut mendapatkan nilai yang belum optimal. Dari hasil LHE RB tersebut ada catatan yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait rencana aksi yaitu rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.

Hal itu juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang menyatakan bahwa target yang ditetapkan pada roadmap RB belum maksimal karena tidak sampai pada target operasional untuk masing-masing Perangkat Daerah. Belum ada pembagian peran dan target secara detail bagi masing-masing Perangkat Daerah mulai dari tahap input, proses, dan outputnya. Selain itu perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaannya.

## 2. Digitalisasi Stunting belum Didukung dengan Proses Bisnis yang Baik

Aplikasi pengelolaan data digital terkait stunting sudah disediakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh pemerintah daerah. Untuk aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat diantaranya:

### a.) Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGA)

Aplikasi yang berisi terkait informasi keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

### b.) Elektronik siap nikah dan hamil (ELSIMIL)

Aplikasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, aplikasi ini ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita yang datanya didapat dari tim pendamping keluarga tiap desa

### c.) Aplikasi verifikasi data keluarga berisiko stunting (Verval)

Aplikasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali dengan tujuan

menyediakan data keluarga berisiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran operasional pendampingan keluarga berisiko stunting dilapangan maupun intervensi program dalam rangka percepatan penurunan stunting

#### d.) Aksi Bangsa

Aplikasi yang dibuat oleh Kemneterian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memantau manajemen penurunan stunting di daerah melalui substansi 8 aksi konvergensi stunting: 1 analisa situasi stunting, aksi 2 rencana kegiatan, aksi 3 rebug stunting, aksi 4 regulasi tentang stunting, aksi 5 pembinaan unsur pelaku, aksi 6 sistem manajemen data, aksi 7 data cakupan sasaran dan publikasi data, aksi 8 review kerja.

Selain melalui aplikasi dari Pusat, pemerintah daerah juga mengembangkan aplikasi pengelolaan data stunting, termasuk pada Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut. Kabupaten ciamis ada aplikasi yang berupa dashboard data stunting Kabupaten Ciamis ([stunting.ciamiskab.go.id](http://stunting.ciamiskab.go.id)) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Kabupaten Garut menyediakan aplikasi berupa dashboard data stunting pada aplikasi satu data Garut yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.

Meskipun ada banyak aplikasi dalam pengelolaan data stunting ternyata ada kendala, yaitu terkait proses bisnis pengelolaan data stunting tersebut yang masih lemah sehingga pelaksanaanya tidak optimal. Salah satunya adalah setiap pembaruan data stunting yang dilakukan oleh TPPS melalui aplikasi Pusat tidak disampaikan kepada Diskominfo sehingga data yang tersedia tidak aktual. Belum ada proses bisnis pengelolaan data digital, khususnya untuk yang lintas sektor (antar perangkat daerah) sehingga pembaruan data aplikasi terhambat.

### 3. Pemanfaatan Data Digital untuk Pengambilan Kebijakan Penurunan Stunting Masih Lemah

Pemanfaatan data stunting untuk pengambilan kebijakan saat ini sudah dilakukan tetapi masih bersifat parsial. Salah satunya adalah TPPS memanfaatkan data tersebut untuk menentukan lokus percepatan penanganan stunting di wilayah yang angka stuntingnya masih tinggi. Selain itu pemanfaatan data digital stunting diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah terkait. Salah satu contoh adalah terkait data lokus dengan angka stunting tinggi akan dijadikan

dasar bagi perangkat daerah melaksanakan kegiatannya di daerah tersebut.

Data gizi buruk digunakan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk memfokuskan pemberian hasil peternakan dan perikanan pada wilayah yang memiliki kondisi gizi buruk masih tinggi. Dinas PUPR melakukan intervensi melalui rutilahu pada daerah yang belum mempunyai jamban. Dinas Kesehatan melakukan tindakan kepada daerah yang kasus gizi buruknya tinggi. Dinas KB melakukan intervensi kepada daerah yang berisiko stuntingnya tinggi.

Pemanfaatan data digital stunting masih belum optimal karena tidak ada proses bisnis yang dibuat dalam rangka pemanfaatan data digital stunting agar lebih memberikan dampak. Belum ada upaya yang lebih terstruktur dalam pemanfaatan data stunting. Hal itu disampaikan oleh TPPS yang menyatakan bahwa pengelolaan data digital stunting sudah cukup baik, tetapi untuk eksekusi intervensi di lapangan masih belum optimal.

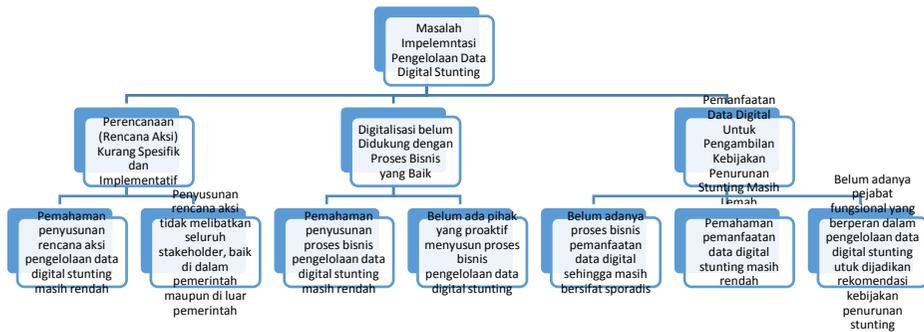
Hasil analisis akar masalah dalam penyiapan implementasi digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penurunan stunting di daerah dapat dilihat pada tabel dan gambar pohon masalah berikut ini:

Tabel 6. Pohon Masalah Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah

<b>MASALAH UTAMA</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1. Perencanaan (Rencana Aksi) Kurang Spesifik dan Implementatif	Pengetahuan dan pemahaman TPPS dalam menyusun rencana aksi pengelolaan data digital stunting masih rendah sehingga belum dapat membuat rencana aksi secara detail dan komprehensif, serta belum	Pemahaman penyusunan rencana aksi pengelolaan data digital stunting masih rendah
		Penyusunan rencana aksi tidak melibatkan seluruh stakeholder, baik di dalam pemerintah

<b>MASALAH UTAMA</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
	terpetakan peran dan target secara detail dan terukur untuk seluruh stakeholder yang terkait	maupun di luar pemerintah
2. Digitalisasi belum Didukung dengan Proses Bisnis yang Baik	Mekanisme (proses bisnis) pengelolaan data stunting dari tahap input, proses dan output masih belum disusun secara detail dan jelas sehingga pelaksanaannya tidak optimal atau tidak berjalan dengan baik	Pemahaman penyusunan proses bisnis pengelolaan data digital stunting masih rendah
		Belum ada pihak yang proaktif menyusun proses bisnis pengelolaan data digital stunting
3. Pemanfaatan Data Digital Untuk Pengambilan Kebijakan Penurunan Stunting Masih Lemah	Pemahaman analisis data digital stunting masih rendah sehingga pemanfaatan data digital stunting masih belum optimal dalam pengambilan kebijakan penurunan stunting	Belum adanya proses bisnis pemanfaatan data digital sehingga masih bersifat sporadis
		Pemahaman pemanfaatan data digital stunting masih rendah
		Belum adanya pejabat fungsional yang berperan dalam pengelolaan data digital stunting untuk dijadikan rekomendasi kebijakan penurunan stunting

Sumber: Olahan Tim Analisis, 2024



Gambar 18. Pohon Masalah Implementasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting di Daerah

Sumber: Olahan Tim Analisis, 2024

Berdasarkan analisis pohon masalah maka dapat ditemukan akar masalah dalam implementasi pengelolaan data digital stunting yaitu:

### 1 Lemahnya pemahaman TPPS dalam pengelolaan data stunting

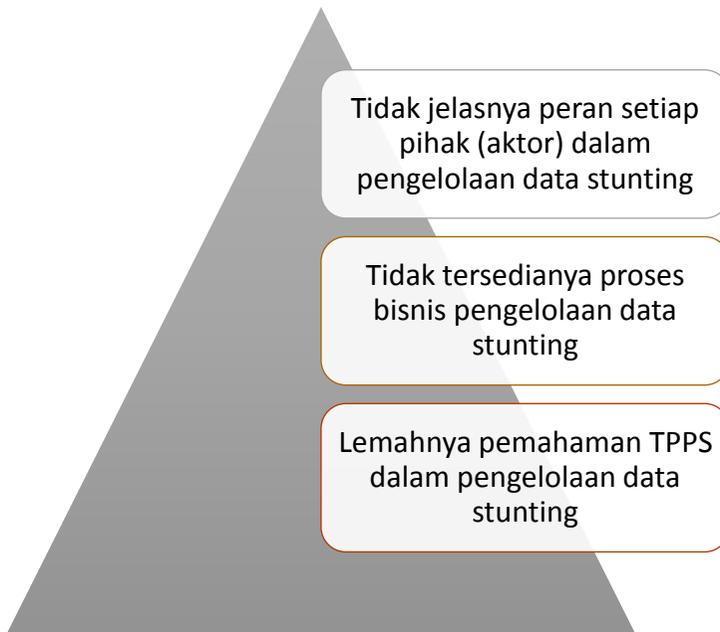
Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) daerah merupakan tim yang dibentuk dan diberikan tugas khusus dalam penanganan stunting di daerah. Tim ini sebagai aktor utama dalam mensukseskan pelaksanaan RB Tematik dengan fokus “digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting”. Sebagai tim yang terdiri dari berbagai perwakilan perangkat daerah, lintas sector, dan mulai dibentuk pada Tahun 2023 maka pemahaman dan pengalaman masih sangat terbatas sehingga masih belum secara optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan, khususnya dalam pengelolaan data stunting.

### 2. Tidak tersedianya proses bisnis pengelolaan data stunting

Pelaksanaan pengelolaan data stunting dimulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan data. Dalam pelaksanaannya sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Saat ini belum ada dokumen proses bisnis yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan data digital stunting. Hal ini menyebabkan masih lemahnya koordinasi antar pihak dalam pengelolaan data digital stunting. Khususnya dalam pemanfaatan data digital stunting tidak dapat dilakukan secara optimal dalam pengambilan kebijakan.

### 3. Tidak jelasnya peran setiap pihak (aktor) dalam pengelolaan data stunting

Banyak pihak (aktor) yang terlibat dalam pengelolaan data digital stunting, mulai dalam proses pengumpulan data, verifikasi dan finalisasi data hingga pemanfaatan data. Pihak-pihak tersebut tidak hanya pemerintah saja melainkan juga non pemerintah, seperti akademisi, media, dan lain-lain. Saat ini pembagian peran setiap aktor dalam pengelolaan data digital stunting masih belum jelas sehingga dalam praktiknya masih ada kelemahan, khususnya dalam pemanfaatan data digital stunting tersebut.



Gambar 19. Akar Masalah Pelaksanaan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Sumber: Olahan Tim Analisis, 2024

## 5. ALTERNATIF REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan pada pelaksanaan RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting ada beberapa alternatif solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

## 1. Penguatan Penguasaan Literasi Digital untuk Pengelolaan Data Digital Stunting

Dalam mendukung proses bisnis pengelolaan data digital sangat diperlukan literasi digital bagi seluruh SDM yang terlibat. Pengetahuan literasi digital diperlukan mulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga pemanfaatan data digital stunting. Penguatan penguasaan literasi digital wajib dimiliki oleh TPPS daerah, karena mereka sebagai penggerak utama dalam pengelolaan data digital sehingga berpengaruh terhadap percepatan penurunan stunting. TPPS daerah merupakan aktor dalam perancangan kebutuhan data digital stunting di daerah, misalnya data calon pengantin, calon ibu hamil, Kesehatan bayi, dan lain-lain.

Penguasaan literasi digital juga harus dimiliki oleh para kader kesehatan karena mereka yang melakukan penginputan data awal stunting di setiap wilayah (desa/kelurahan). Hasil penginputan data akan diverifikasi oleh kecamatan dan dinas terkait, sehingga mereka pun harus sama-sama mempunyai pengetahuan dan penguasaan literasi digital yang baik. Lebih lanjut, penguasaan data digital harus dimiliki oleh pihak-pihak yang memanfaatkan data digital stunting tersebut, seperti tim analis dan pimpinan.

## 2. Penyusunan Proses Bisnis Pengelolaan Data Digital Stunting yang Komprehensif

Upaya penurunan stunting melibatkan banyak pihak yang terkait. Di dalam unsur pemerintah saja dilakukan oleh berbagai pihak, dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Komposisi TPPS yang dibentuk juga terlibat dari berbagai unsur perangkat daerah. Dengan banyaknya pihak yang terlibat tersebut sangat diperlukan pengaturan terkait poses bisnis atau mekanisme kerja dalam pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk dalam pengelolaan data digital stunting. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data digital harus dipetakan, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Pemetaan itu dimulai dari proses pengumpulan data lapangan, verifikasi data lapangan, penginputan data pada sistem, verifikasi data pada sistem, finalisasi data pada sistem, dan pelaporan final disistem serta pemanfaatan data digitalisasi stunting.

Seluruh proses bisnis perlu dipetakan, baik yang bersifat makro (lintas sector/ lintas OPD) maupun mikro (di

masing-masing OPD). Pembuatan proses bisnis pemanfaatan data digitalisasi stunting dapat menjadi panduan bagi seluruh actor yang terlibat. Salah satunya bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang merupakan aktor utama dalam pengelolaan data digital stunting.

Untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis pengelolaan data digital stunting maka harus disiapkan SDM yang memadai dengan jumlah dan kompetensi tepat. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan jumlah dan kompetensi SDM yang terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan data digital. Untuk jumlah SDM yang masih kurang maka pemerintah daerah perlu melakukan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan jumlah SDM tersebut. Apabila ditemukan ada gap kompetensinya maka pemerintah daerah bisa melakukan upaya pengembangan kompetensinya. Diharapkan dengan jumlah dan kompetensi SDM yang memadai diharapkan dapat menghasilkan data digital stunting yang akurat dan berkualitas.

Untuk mendukung proses bisnis pengelolaan data digital stunting harus didukung juga dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan utama adalah terkait keterjangkauan internet karena sistem yang digunakan berbasis online. Khususnya untuk Kabupaten Garut yang masih mempunyai wilayah blanspot (5 desa) perlu melakukan upaya untuk menambah BTS di daerah tersebut. Pemerintah Garut dapat melakukan pengadaan BTS dengan melibatkan pihak pemerintah pusat (Kemeneterian Komunikasi Informasi), pemerintah provinsi, dan pihak swasta. Selain jaringan, diperlukan perangkat yang memadai bagi petugas pengelola data digital stunting. Terkait hal ini untuk petugas yang masih belum mempunyai perangkat tersebut maka pemerintah daerah, melalui TPPS dapat melaukan pengadaan perangkat tersebut. Pengadaan perangkat ini juga dapat menggandeng pihak swasta melalui program corporate responsibility (CSR) yang disediakannya. Sarana prasarana ini, baik jaringan dan internet dan perangkat tegnologi, harus dipastikan mendukung untuk melakukan pengelolaan data stunting agar berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang lengkap dan akurat.

### 3. Peningkatan Peran Semua Pihak (aktor) dalam Pengelolaan Data Digital Stunting Secara Komprehensif dan Kolaboratif

Penurunan stunting merupakan upaya yang kompleks, tidak hanya dari sektor kesehatan saja melainkan berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, social, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, TPPS harus dapat melakukan pemetaan target yang lebih detail untuk penurunan angka stunting di daerahnya. Selain itu TPPS juga harus memetakan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai target yang telah ditentukan sehingga jelas penanggung jawabnya. Salah satu contohnya dari unsur pemerintah dari setiap perangkat daerah ditentukan target yang perlu dicapai

Penurunan stunting memerlukan upaya dari seluruh pihak, dari tingkat desa hingga kabupaten dan tidak hanya oleh unsur pemerintah saja. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan penurunan stunting, khususnya pembahasan rencana aksi daerah, harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Kemampuan pemerintah terbatas sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak terkait, diantaranya pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat dan media massa.

Dengan penyusunan perencanaan yang lebih detail dan melibatkan stakeholder, diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi daerah penurunan stunting yang lebih akurat serta mempermudah dalam implementasinya. Tidak hanya itu, diharapkan dengan perencanaan yang akurat dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam penurunan stunting.

Proses pengumpulan, verifikasi, dan finalisasi data melibatkan banyak pihak. Pengumpulan data dimulai dari tingkat desa, bahkan dari tingkat posyandu pada tiap rukun warga (RW) yang dilakukan oleh para kader. Proses verifikasi data selanjutnya dilakukan oleh pihak desa dan kecamatan setempat. Finalisasi data dilakukan oleh perangkat daerah terkait hingga penginputan dalam sistem. Peran pihak-pihak ini sangat krusial terhadap keakuratan dan kredibilitas data digital stunting.

Data digital stunting yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal. Selain yang sudah dilakukan saat ini, pemerintah daerah perlu melibatkan pejabat fungsional yang terkait untuk melakukan analisis hasil digital stunting dan membuat rekomendasi kebijakan penurunan stunting yang tepat. Kolaborasi pejabat fungsional, di antaranya penyuluh kesehatan masyarakat, perencana,

peneliti, dokter, perawat, bidan, analis kebijakan, dan lainnya diharapkan dapat melakukan analisis secara mendalam setiap permasalahan stunting di masing-masing wilayah. Analisis mendalam dapat dilakukan dengan mengidentifikasi *Critical Success Factor (CSF)*, sehingga melalui analisis tersebut dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Peran pejabat fungsional tersebut harus didorong lebih maksimal agar lebih berkontribusi dalam upaya penurunan stunting di daerah. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah.

Peran pimpinan sangat strategis dan krusial dalam mensukseskan upaya percepatan penurunan stunting, khususnya dalam pengelolaan data digital stunting di daerah. Kepala daerah dan kepala perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mengawal pelaksanaan digitalisasi stunting di daerah. Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan proses bisnis pengelolaan data digital stunting serta memastikan TPPS dan aktor-aktor lainnya melaksanakan tugas sesuai perannya. Hal terpenting selanjutnya adalah pimpinan daerah dapat memanfaatkan hasil analisis data digital stunting untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerahnya. Kebijakan yang baik dimulai dengan menetapkan rencana aksi yang baik, yang bersifat implementatif dan komprehensif.

Untuk melaksanakan alternatif kebijakan tersebut maka perlu disusun strategi implementasinya agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yaitu peningkatan pengelolaan data digital stunting. Strategi implementasi tersebut antara lain:

- TPPS daerah melakukan identifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data stunting, mulai dari proses pengumpulan data hingga pemanfaatan data digital stunting;
- TPPS mengundang, meminta dukungan dan memberikan pembekalan kepada semua pihak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan data digital stunting dengan mengundang pihak akademisi, professional, dan lainnya
- TPPS bersama seluruh pihak menyusun perencanaan pengelolaan data digital stunting termasuk proses bisnis dan pembagian peran serta target masing-masing pihak (aktor)
- TPPS melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan data digital stunting serta melaporkan kepada pimpinan
- Pimpinan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan data digital stunting dan memanfaatkan data tersebut untuk mengambil kebijakan yang tepat

## DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, Ahmad. Ely Nurhayati.2023.” Future Food Demand in Poor Indonesian Districts”. Jakarta. CIPS (Center for Indonesian Policy Studies)

Hanapi. 2023. Pemkab Garut Terima Penghargaan Digital Government Award Dari Kemenpan RB. <https://www.garutkab.go.id/news/pemkab-garut-terima-penghargaan-digital-government-award-dari-kemenpan-rb>.

Hermansyah, Dadang. 20 Agustus 2023. ”Angka Stunting di Ciamis Kembali Naik Jadi 18,6 Persen”. Diakses pada 7 Mei 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6895623/angka-stunting-di-ciamis-kembali-naik-jadi-18-6-persen>.

Kementerian Kesehatan RI. 14 September 2022. “Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita”. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1529/faktor-faktorpenyebab-kejadian-stunting-padabalita](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktorpenyebab-kejadian-stunting-padabalita), diakses 12 Juni 2024

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2023. ”Modul RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan” Penanganan Stunting”. Diakses pada 7 Mei 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Rxi0jW516RA>

Kumparan Bisnis. 9 Juli 2023. “Riset CIPS: 21 Juta Orang Indonesia Kurang Gizi, 21,6 Persen Balita Stunting”. Diakses pada 7 Mei 2024. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-cips-21-juta-orang-indonesia-kurang-gizi-21-6-persen-balita-stunting-20150VJpLt4/full>

Kementerian Sekretariat Negara RI. 30 September 2023.”Hasil Perhitungan IKPS Nasional dan Provinsi Tahun 2022”. Diakses pada 7 Mei 2024. <https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/>

Pelopor Wiratama. 2023. Ciamis Meraih Penghargaan TP2DD Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali Tahun 2023. <https://peloporwiratama.co.id/2023/10/03/ciamis-meraih-penghargaan-tp2dd-kabupaten-terbaik-wilayah-jawa-bali-tahun-2023/>).

Saifuddin, Ridwan. Irma Nurachmi.Decky Ferdiansyah. 2022. Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Inovasi Pembangunan-  
Jurnal Kelitbangan-Volume 10 No. 3 Tahun 2022

Sisilianingsih, Sari, *et al.* 2023. Analisis Faktor Transformasi Digital  
Pelayanan Publik Pemerintah di Era Pandemi. Jurnal Teknologi  
Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Vol. 10 No. 4 Tahun 2003.

### **Dokumen dan Kebijakan**

Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan  
Stunting 2018.

Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kabupaten  
Ciamis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan  
Stunting.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 –  
2024.